KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pimpinan DPR Beri Sinyal Positif Pengesahan
Tanggal : Jumat, 07 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

RUU TPKS

Pimpinan DPR Beri Sinyal Positif Pengesahan

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kian menunjukkan titik terang. Pimpinan DPR menegaskan komitmennya untuk segera mengesahkan. Di sisi lain, fraksi yang menolak pun terus berkurang. Komitmen pemerintah dan DPR yang sejalan itu tetap perlu dikawal untuk memastikan undang-undang berpihak kepada korban.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR akan memprioritaskan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) agar dapat segera dibahas bersama pemerintah. Ia memastikan, setelah masa sidang dibuka, DPR akan segera menggelar rapat pimpinan dan Bamus untuk membawa draf RUU TPKS ke rapat paripurna selanjutnya untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

"Dalam masa sidang ke depan, kami akan prioritaskan untuk segera di-bamus-kan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surat presiden untuk kemudian kami bahas," kata Sufmi, Kamis (6/1/2022).

DPR yang kini masih memasuki masa reses akan memulai masa sidang pada 11 Januari. Masa sidang berlangsung selama enam pekan sebelum kembali masuk masa reses pada 21 Februari.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini RUU TPKS akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada Januari ini. Ia meminta Fraksi PKB untuk mengawal pembahasannya hingga disahkan di DPR.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyambut baik respons positif Presiden yang mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS. Dia memastikan RUU ini akan segera disahkan sebagai inisiatif DPR.

Berubah sikap

Adapun Fraksi Partai Golkar, yang meminta agar RUU TPKS ditunda karena masih ingin mendengarkan masukan publik, kini berubah sikap dan menyatakan dukungannya terhadap RUU TPKS. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menolak.

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengatakan, Fraksi Partai Golkar mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang meminta DPR untuk segera mengesahkan RUU TPKS menjadi UU. Dukungan ini juga sesuai dengan arahan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Fraksi Golkar tidak keberatan dan mendukung agar RUU TPKS ini segera dijadikan UU. Kami melihat semua persyaratan untuk pembentukan UU juga sudah terpenuhi," ujarnya.

Wakil Ketua Satgas RUU TPKS yang juga Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, urgensi pengesahan RUU TPKS tidak dapat diperdebatkan lagi. "RUU TPKS sangat jelas dan perlu ditindaklanjuti oleh semua pemangku kepentingan, dengan mengesampingkan ego politik dan sektoral serta menempatkan semangat menciptakan perlindungan bagi seluruh warga negara dari ancaman kekerasan seksual sebagai tujuan utamanya," tuturnya.

Sejauh ini, jumlah kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Komnas Perempuan mencatat, 25 persen perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. Setiap hari, minimal terdapat 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut catatan Komnas Perempuan, dalam 10 tahun terakhir terdapat lebih dari 49.000 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan kekerasan pada anak juga meningkat. Sebanyak 11.279 kasus terjadi sepanjang tahun 2020.

(SYA/REK/HAR)